

TV Analog di Jabodetabek Dimatikan 5 Oktober

JAKARTA (IM) - Siaran TV analog di area Jabodetabek akan dimatikan pada 5 Oktober 2022. Masyarakat yang di tinggal wilayah tersebut, tentunya harus siap-siap jangsan sampai televisi di rumah jadi mati mendadak.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutuskan penghentian di sejumlah daerah, termasuk Jabodetabek yang merupakan episentrum dari kegiatan pertelevisian di Indonesia.

Adapun daerah administratif yang terdampak pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) di Jabodetabek terdiri dari 14 kabupaten/kota, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Berikut cara migrasi dari TV analog ke TV digital: Pastikan di daerahmu sudah terdapat siaran TV digital. Untuk mengetahuinya bisa unduh aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store maupun App Store.

Gunakan antena biasa, baik yang dipasang luar rumah atau di dalam rumah. Pastikan bahwa pesawat televisi sudah dilengkapi penerima siaran TV digital DVB-T2.

Jika televisi detikers analog, maka bisa diakali dengan menggunakan alat tambahan bernama set top box.

Setelah perangkat televisi tersambung, pilih opsi pengaturan/setting. Pilih auto scan untuk memindai program siaran

TV digital.

Dalam melakukan suntik mati TV analog ini, Kominfo menggunakan cara multiple ASO, yakni penghentian siaran analog yang dilakukan secara terus-menerus sampai batas akhir migrasi penyiaran pada 2 November 2022.

Untuk menerapkan suatu daerah sudah ASO atau belum, kini mengacu pada tiga kriteria utama, di antaranya: Terdapat siaran televisi analog di wilayah yang akan dihentikan siarannya.

Wilayah yang terdampak dengan siaran televisi analog sudah siap digantikan dengan siaran TV digital.

Bantuan Set Top Box (STB) untuk rumah tangga miskin di daerah tersebut sudah terdistribusi.

Bantuan set top box gratis TV digital tersebut bersumber dari penyelenggara multiplexing (mux) sebanyak 5,7 juta unit disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun, Kominfo juga turut menyalurkan bantuan sebanyak satu juta unit STB gratis kepada rumah tangga miskin itu.

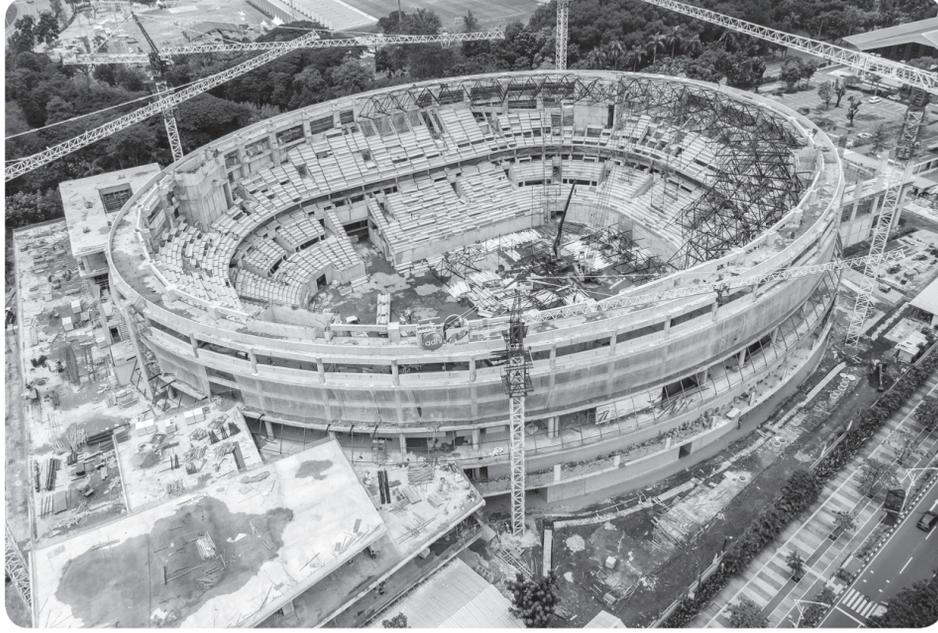
Sementara itu, bagi kelompok masyarakat mampu diimbau untuk membeli perangkat STB yang sudah tersedia secara online dan offline dengan rentang harga Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu tergantung keunggulan fitur-fitur masing-masing perangkat.

Penerapan ASO ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



PEMBANGUNAN INDOOR MULTIFUNCTION STADIUM

Foto udara proyek pembangunan Indoor Multifunction Stadium di Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9). Pembangunan stadion seluas 30.720 meter persegi dengan kapasitas penonton yang sudah ada saja Pemprov DKI tidak mampu menangannya dan bagaimana pasokan air bersihnya," tutur Nirwono.

Nirwono berpandangan warga pesisir sekarang saja saat ini masih kesulitan air bersih. Sementara, Pemprov DKI dinilai belum mampu menyediakan akses air bersih yang layak bagi mereka. "Jika untuk permukiman, berarti luas pulau untuk ruang terbuka hijau (RTH) menjadi berkurang sehingga dampak terhadap lingkungan, baik itu kesejukan, keasrian, dan ke-segaran juga turut berkurang," ujar Nirwono.

Kepala Dinas Cipta Karya,

Pakar: Bermasalah Sejak Awal, Sebaiknya Pulau G Jadi Permukiman Dibatalkan

Pulau G tidak layak dijadikan kawasan permukiman karena akan memberikan dampak terhadap lingkungannya. Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mengkaji ulang kebijakan tersebut, bahkan jika perlu dibatalkan, kata Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga.

JAKARTA (IM) - Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta, Pulau G diarahkan untuk permukiman. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 192 nomor

(3) Pergub Nomor 31 Tahun 2022. Bunyinya yakni, "Kawasan Reklamasi Pulau G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk kawasan pemukiman."

Namun, yang merupakan hasil reklamasi mulai terkikis oleh air laut, setelah seki-

tar enam tahun terbengkalai. Abrasi laut perlahan-lahan membuat pulau buatan ini dipenuhi air.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. "Jika perlu dibatalkan. Mengingat reklamasi Pulau G mengundang masalah di masyarakat sejak awal pembangunannya," ujar Nirwono, Selasa (27/9). Menurut Nirwono, Pulau G tidak layak dijadikan kawasan permukiman karena akan memberikan dampak terhadap lingkungannya.

Nirwono menyebutkan dampak lingkungan yang bakal muncul di antaranya soal penyediaan air bersih hingga

pengelolaan sampah dan limbahnya. "Sementara dari permukiman yang sudah ada saja Pemprov DKI tidak mampu menangannya dan bagaimana pasokan air bersihnya," tutur Nirwono.

Nirwono berpandangan warga pesisir sekarang saja saat ini masih kesulitan air bersih. Sementara, Pemprov DKI dinilai belum mampu menyediakan akses air bersih yang layak bagi mereka. "Jika untuk permukiman, berarti luas pulau untuk ruang terbuka hijau (RTH) menjadi berkurang sehingga dampak terhadap lingkungan, baik itu kesejukan, keasrian, dan ke-segaran juga turut berkurang," ujar Nirwono.

Pertanahan, dan Tata Ruang DKI Jakarta, Heru Hermawanto sebelumnya berujar belum dipastikan untuk permukiman. Sebab, peruntukan Pulau G masih akan diatur dalam peraturan daerah (perda). "Itu sebenarnya belum (dipastikan) karena itu belum ditentukan. Itu harus diatur di perda," tutur Heru, beberapa waktu lalu.

Menurut Heru, perda yang akan merincikan peruntukan Pulau G adalah perda rencana tata ruang wilayah (RTRW). "Begitu nanti perda RTRW-nya bunyi, (peruntukan Pulau G) didetailkan," sebut dia. Heru mengakui bahwa Pulau G diarahkan untuk permukiman karena kebutuhan warga Ibu Kota atas tempat tinggal masih tergolong tinggi. ● yan



FOTO:ANT

WAKSIN RABIES GRATIS DI JAKARTA

Petugas memeriksa telinga kucing sebelum disuntik vaksin rabies di Kantor Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (27/9). Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian memberikan vaksin rabies secara gratis bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus rabies pada hewan peliharaan sekaligus menyambut Hari Rabies Sedunia 2022.

Anies Targetkan Penumpang Transportasi Umum Capai 4 Juta Per Hari di 2030

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI memfasilitasi masyarakat dengan kendaraan umum yang terjangkau dan nyaman. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan langkah itu dilakukan agar warga Jakarta beralih ke transportasi umum.

"Pemerintah menyiapkan infrastrukturnya, lalu memberikan insentifnya, insentifnya apa? Kalau naik kendaraan umum, biayanya terjangkau, selama perjalanan nyaman. Itu insentif," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (27/9).

Anies menyebut pihaknya terus mencari strategi dalam memberikan kenyamanan di transportasi umum. Dia menargetkan pada 2030 akan ada 4 juta penumpang per hari yang menggunakan kendaraan umum.

"Karena itu, kami yakin,

jika insentif itu ada dalam bentuk subsidi, jangkauan kendaraan umum diperluas, armanadanya ditambah, saya yakin jumlah pengguna kendaraan umum di Jakarta akan bisa meningkat. Dan sesuai target, 2030 bisa mencapai 4 juta penumpang per hari," tutur dia.

"Jadi target itu bukan hari ini, tapi 2030. Sekarang alhamdulillah dari kemarin dari 300 ribuan menjadi 1 juta, tinggal kita teruskan trennya," lanjut Anies.

Anies mengungkapkan ada peningkatan jumlah penumpang kendaraan umum dari 350 ribu menjadi total 1 juta per harinya. Peningkatan jumlah penumpang ini, lanjut dia, berawal dari rasa nyaman masyarakat ketika naik kendaraan umum. "Nah, kita sudah menyaksikan jumlah ridership yang meningkat, dari 350 ribu menjadi 1 juta penumpang. Itu artinya orang yang mencoba, merasakan 'oh nyaman', dia kembali lagi mencoba, karena itulah ridership meningkat sehingga naik kendaraan umum adalah pilihan yang rasional," papar Anies.

"Sehingga ketika orang naik kendaraan umum bukan karena diwajibkan, tapi karena merasa naik kendaraan umum pilihan yang rasional. Kalau dia merasa itu pilihan yang rasional, maka dia akan mengerjakan (naik) lagi. Jadi pilihan menggunakan kendaraan umum bukan karena diharuskan, tapi karena itu adalah pilihan rasional," sambungnya. ● yan

Anies Berharap Proyek Hunian DP 0 Rupiah Dilanjutkan Oleh Gubernur Selanjutnya

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merencanakan kelanjutan pembangunan rumah tanpa DP alias DP 0 rupiah untuk dijalankan oleh Penjabat (Pj) Gubernur selanjutnya.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026.

Namun, saat ditanya mengenai hal tersebut, Anies belum mau berkomentar.

"Nanti biar dijelaskan lengkap aja semuanya. Kan semuanya sudah jadi satu pro-

gramnya jadi satu kesatuan," kata Anies di Jakarta, Selasa (27/9).

Jika dilihat dalam dokumen RPD, Anies menjabarkan sejumlah upaya untuk mendukung kebijakan pelaksanaan DP 0 rupiah. Di antaranya adalah pengadaan tanah melalui kewajiban pihak ketiga, kerjasama business to business.

Selanjutnya, lanjut dia, penganggaran dana fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kemudian, kebijakan batasan harga jual rumah untuk masyarakat yang mengakses fasilitas pembiayaan pemilikan

rumah. Lalu, kerja sama dengan bank pelaksana penyaluran kredit atau fasilitas pembiayaan pemilikan rumah.

Serta, pembentukan badan layanan umum daerah (BLUD) yang bertugas mengelola dana perumahan program DP Nol Rupiah.

Dalam RPD ini, Anies menurunkan target jumlah unit Rumah DP 0 rupiah yang dibangun.

Sebelumnya saat awal menjabat, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menargetkan pembangunan 232.214 unit yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Kini, Anies menurunkan target unit rumah untuk dikerjakan Pemprov DKI menjadi tak sampai 10 ribu unit.

"Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan Swasta/BUMN," tulis Anies dalam dokumen RPD.

Anies pun mengakui bahwa masih terdapat kendala

dalam persiapan lahan oleh pelaku pembangunan sehingga tahapan proses pembangunan berpotensi mundur.

Dengan menimbang status lahan yang sudah clean and clear, diharapkan terjadi akad kredit sebanyak 2.000 unit. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan bakal purna dari jabatannya sebagai Gubernur DKI pada 16 Oktober 2022 mendatang. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan kursi DKI 1, Presiden Joko Widodo akan menunjuk satu orang sebagai Pj Gubernur DKI pengganti Anies. ● yan

Peringati Hantaru ke-62, BPN Jakarta Barat Bagikan 34 Sertifikat Secara Simbolis

JAKARTA (IM) - Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko menjadi inspektur upacara dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) ke-62, di halaman Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (26/9) pagi.

Pada Peringatan Hantaru ke-62, Kantor ATR/BPN Jakarta Barat, membagikan secara simbolis 34 sertifikat untuk tiga jenis kepemilikan hak. Untuk kepemilikan sertifikat jenis 5 Hak Milik, 19 Hak Pakai, 5 Hak Guna Bangunan dan 5 Hak Wakaf. Sertifikat tersebut diberikan kepada masyarakat, lembaga dan sertifikat milik Pemprov DKI Jakarta.

Dalam amanat pidato yang dibacakan oleh Walikota Jakarta Barat, Menteri ATR/

BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, peringatan Hantaru tahun 2022 dengan tema "Kementerian ATR/BPN Cepat, Berkualitas, dan Tangguh" akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan perizinan, penanganan masalah dan database yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif dan efisien.

"Saya mengingatkan kembali kepada tugas yang saya arahkan pada saat rakernas, sejalan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden pada saya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan: 1. Percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 2. Penyelesaian sengketa dan



konflik pertanahan dengan reforma agraria serta pemberantasan mafia tanah. 3. Dukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," papar Hadi Tjahjanto.

Menurut Hadi Tjahjanto,

dengan program PTSL, ATR/BPN mendapat loncatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum program PTSL. Hingga saat ini, capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang, atau setara dengan 64,7 persen.

"Untuk mencapai target 100 persen pada tahun 2025 harus menyusun strategi yang terbaik. Saya mengingatkan, pentingnya mengejar target PTSL. Namun yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas produk sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," pungkasnya.

Pada peringatan Hantaru ke-62 ini tampak hadir perwakilan Sekretaris Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Ketua Komisi A dan Anggota DPRD DKI Jakarta, Komandan Distrik Militer (Dandim) 05/03 Jakarta Barat, Kapolres Jakarta Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta, Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Jakarta Barat, Camat Kembangan, Camat Kebon Jeruk, Kecamatan Grogol Petamburan, Lurah Duri Kepa, Lurah Kembangan Utara, Ketua IPPAT Jakarta Barat, Direktur PT Permata Hijau dan Direktur PT Antilope Madju Putri Indah. ● ber

PENGUMUMAN
Memenuhi ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan kepada pihak manapun yang berkepentingan bahwa seluruh pemegang saham PT. KWARTAPUTRA SENTRA SINDO, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), akan melaksanakan penjualan atas sebagian besar sahamnya. Bagi pihak manapun yang memiliki tagihan terhadap Perseroan atau keberatan terhadap penjualan seluruh saham tersebut, mohon segera dapat menyampaikannya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, ke alamat:
Jl. Sawo Kecik V No.8, RT.11/RW.7, Bukit Duri, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12840
Terima kasih atas perhatiannya.
Jakarta, 19 September 2022
Direksi
PT. KWARTAPUTRA SENTRA SINDO

